

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2012**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

MARISSA AYU SAPUTRI
NIM. C2C607093

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MARISSA AYU SAPUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607093
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi
Judul Skripsi : *Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU)
Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja
Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun
2011-2012
Dosen Pembimbing : Dul Muid, S.E., MSi., Akt.

Semarang, 14 February 2014

Dosen Pembimbing,

(Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 196505131994031002

PERSETUJUAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : MARISSA AYU SAPUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607093
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi
Judul Skripsi : *Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU)
Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja
Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun
2011-2012

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Maret 2014

Tim Penguji:

1. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, SE., M.Si., Akt. (.....)
3. Fuad, SE., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Marissa Ayu Saputri, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2012, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 February 2014
Yang membuat pernyataan,

(Marissa Ayu Saputri)
NIM : C2C607093

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memberikan bukti empiris apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. (2) Untuk memberikan bukti empiris manakah yang berpengaruh paling signifikan terhadap belanja daerah antara DAU dan PAD di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. (3) Untuk memberikan bukti empiris Apakah terjadi *flypaper effect* pada tahun 2011-2012. (4) Untuk memberikan bukti empiris apakah *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi atau daerah dengan PAD rendah.

Populasi dalam penelitian ini adalah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam periode tahun 2011-2012, jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia adalah sebanyak 29 Kabupaten dan 6 Kota madya. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa: (1) PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. (2) Variabel DAU lebih berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Ini membuktikan adanya *flypaper effect* dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD (3) Variabel DAU_{t-1} lebih berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD_{t-1} . Ini juga membuktikan bahwa *flypaper effect* juga terjadi dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} . (4) *Flypaper effect* terjadi pada daerah dengan PAD rendah dan daerah dengan PAD tinggi.

Kata Kunci: DAU, PAD, belanja daerah, *flypaper effect*

ABSTRACT

This study aims to (1) provide empirical evidence whether the DAU and revenue affect the shopping area in the District / City of Central Java. (2) To provide empirical evidence which one of the most significant influence on the shopping area between the DAU and PAD in the District / City of Central Java. (3) In order to provide empirical evidence of flypaper What happened in 2011-2012. (4) In order to provide empirical evidence whether the flypaper occur in areas with local revenue (PAD) PAD areas with high or low.

The population in this study is the district / town in Central Java in the period of 2011-2012, the number of districts / cities in Indonesia are as many as 29 districts and 6 municipalities. The analytical tool used is multiple linear regression analysis.

Based on the results of tests performed can be seen that: (1) PAD and DAU together have a significant impact on regional expenditure. (2) Variable DAU more significant effect on local spending compared with PAD. This proves the existence of flypaper Local Government in response to the DAU and PAD (3) Variable DAU_{t-1} is more significant effect on local spending compared with PAD_{t-1} . It also proves that the flypaper also occur in response to the Local Government and PAD_{t-1} . (4) whether the fly paper effect happened in the regions which have a high Regionally Original Income or in the other way. The important findings of this research indicate that all regions although have high Regionally Original Income, experienced the flypaper effect..

Keywords: DAU, PAD, regional expenditure, flypaper

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kurnia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2012”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, saran, motivasi serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang terdalem kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D; selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dul Muid, SE, M.si, Akt; selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, dorongan, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. H. Sudarno, M.Si, Akt., Ph.D; selaku dosen wali yang memberikan dukungan, arahan, dan saran selama menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro.
4. Prof. Dr. H. Mohamad Syafruddin, M.Si., Akt; selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

6. Mama, Papa, dankakak atas pengertian, doa, dukungan, sehingga penulis dapat terus bersemangat menyelesaikan penelitian ini.
7. Para Sahabat Akmala Maulida Ikramina, Richa Puspita Alfia, Allan Dwi I'sana dan Nihal atas do'a, kontribusi dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun penulis sadar bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 14 February 2014

Penulis

(Marissa Ayu Saputri)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“KEHIDUPAN INI BUKAN KESIBUKAN UNTUK MENGHINDARI KEJATUHAN,
TAPI UNTUK BANGKIT LEBIH GAGAH SETIAP KALI JATUH.”

MARIO TEGUH

“BELAJAR DARI ORANG LAIN TIDAK PERLU MENUNGGU TULISAN,
BELAJAR DARI ORANG LAIN BISA DENGAN MENGAMATI, MENGERTI
CARA BERPIKIR DAN CARA BEKERJANYA.”

TUNG DESEM WARINGIN

Dipersembahkan kepada:

Keluarga tercinta, para sahabat dan pembaca
yang sangat berarti bagiku.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Otonomi Daerah.....	8
2.1.2. <i>Flypaper effect</i>	9
2.1.3. Identifikasi <i>Flypaper effect</i>	11
2.1.4. Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.5. Belanja Daerah.....	19
2.1.6. Dana Alokasi Umum.....	23
2.2. Penelitian Terdahulu	25
2.3. Kerangka Pemikiran	29
2.4. Pengembangan Hipotesis	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian	34
3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	34
3.3. Populasi dan Sampel.....	36
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.6. Metode Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif	43
4.2. Hasil Uji Normalitas	44
4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik	45
4.4. Hasil Analisis Data	48

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Kesimpulan	58
5.2. Keterbatasan Penelitian	60
5.3. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1	Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi.....	40
Tabel 4.1	Descriptive Statistics	43
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Uji Normalitas Residual	45
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas.....	46
Tabel 4.4	Nilai Durbin Watson	46
Tabel 4.5	Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Park).....	48
Tabel 4.6	Regresi Linear Berganda.....	48
Tabel 4.7	Koefisien Determinasi Model	50
Tabel 4.8	Hasil Pengujian P Value(H1)	51
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda(H2).....	51
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda(H3).....	53
Tabel 4.11	Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda(H4).....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1	Daerah Autokorelasi	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No.22 Tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan Indonesia tentang Otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Otonomi daerah disatu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun disisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bird dan Vaillancourt (Susilo, 2002) menyatakan bahwa ada tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah yaitu:

1. Desentralisasi, yang berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau pemerintah daerah.

2. Delegasi yang berhubungan dengan situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah.
3. Devolusi atau pelimpahan yang berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan berada di daerah.

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik, *et al*, 2002). Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Pajak dan Sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

Pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang

oleh pemerintah daerah dilaporkan dan diperhitungkan dalam APBD. Tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar-daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah (Sidik, dkk, 2002). Menurut Saragih (2003), berbagai penafsiran mengenai DAU diantaranya (a) DAU merupakan hibah yang diberikan pemerintah pusat tanpa ada pengembalian, (b) DAU tidak perlu dipertanggungjawabkan karena DAU merupakan konsekuensi dari penyerahan kewenangan atau tugas-tugas umum pemerintahan ke daerah, (c) DAU harus dipertanggungjawabkan, baik ke masyarakat lokal maupun ke pusat, karena DAU berasal dari dana APBN.

Beberapa peneliti menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (1999) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypaper effect* (Halim, 2002).

Abdul Halim dan Sukriy Abdullah (2002) melakukan pengujian adanya *flypaper effects* pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh

wilayah Indonesia. Karena menurut Halim (2002) pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Menanggapi hal tersebut, Maimunah (2006) melakukan penelitian yang sama pada pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Sumatera pada tahun 2003 dan 2004. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Abdul Halim dan Sukriy Abdullah (2002) yaitu DAU periode t-1 memiliki pengaruh lebih besar dari pada PAD periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Namun ketika diuji pengaruh DAUt dan PADt secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah t, hasilnya PAD tidak signifikan dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan sampel daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan data PAD, DAU, Belanja Daerah dan Total Belanja serta laporan APBD Pemerintah Daerah kabupaten/kota, hal ini dikarenakan bahwa Jawa Tengah telah memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama dengan penelitian sebelumnya dan ketersediaan data pada penelitian (Maimunah, 2006). Untuk tujuan tersebut di atas, maka disusunlah penelitian yang berjudul ***“Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2012”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

- 1 Apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah?
- 2 Antara DAU dan PAD, manakah yang berpengaruh paling signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah?
- 3 Apakah terjadi *flypaper effect* pada tahun 2011-2012?
- 4 Apakah *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi atau daerah dengan PAD rendah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah :

- 1 Untuk memberikan bukti empiris apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.
- 2 Untuk memberikan bukti empiris manakah yang berpengaruh paling signifikan terhadap belanja daerah antara DAU dan PAD di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.
- 3 Untuk memberikan bukti empiris Apakah terjadi *flypaper effect* pada tahun 2011-2012.

- 4 Untuk memberikan bukti empiris apakah *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi atau daerah dengan PAD rendah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang berupa:

1. Kontribusi empiris

Untuk memperkuat penelitian sebelumnya berkenaan dengan adanya *flypaper effect* yang terjadi dalam transfer dana DAU dan PAD terhadap Belanja daerah yang dilakukan secara empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

2. Kontribusi kebijakan

Untuk memberikan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD, serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menyertainya.

3. Kontribusi teori

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab Hasil Penelitian dan Analisis berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi data.

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan keuangan diperlukan juga adanya sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi (Rudini dalam Silalahi, *et al*, 1995).

Silalahi, *et al*. (1995) menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah :

- 1 Mempunyai wadah, perilaku, kualitas, tujuan, dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.
- 2 Kreatif dalam arti mempunyai jiwa inovatif, serta mampu mengantisipasi tantangan maupun perkembangan, termasuk di dalamnya mempunyai etos kerja yang tinggi.
- 3 Mampu sebagai penggerak swadaya masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu kerjasama dan mempunyai orientasi berpikir *people centered orientation*.

- 4 Mempunyai disiplin yang tinggi dalam arti berpikir konsisten terhadap program, sehingga mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi program operasional pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu pengertian program urusan yang ditetapkan.

2.1.2. Flypaper effect

Pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan dari teori perilaku konsumen. Wilde (1968) mempelopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indiferensi. Analisis Wilde yang menghubungkan pengeluaran konsumsi barang privat dan barang publik. Layaknya seorang individu, masyarakat mempunyai preferensi seperti ditunjukkan oleh kurva indiferensi (U_0, U_1, U_2) dengan kendala anggaran (garis Y dan $Y+G$ (*grant*)). Masyarakat dianggap berperilaku rasional yang memaksimalkan utilitas dengan kendala pendapatannya.

Transfer bersyarat (*conditional grants*) berpengaruh pada konsumsi barang privat melalui efek harga. Bantuan bersyarat, misalnya transfer penyeimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*), akan menurunkan harga barang publik. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik. Bantuan bersyarat berasosiasi dengan pergeseran garis anggaran berputar ke kanan sehingga garis anggaran yang baru lebih datar. Konsekuensinya, konsumsi barang publik mengalami peningkatan dari yang semula Z_0 menjadi sebesar Z_1 .

Pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat tergantung pada sensitivitas silangnya. Harga barang publik yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajak. Sebelum ada penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat adalah sebesar X_1 . Setelah penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat meningkat menjadi sebesar X_2 . Dengan demikian, kenaikan transfer sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian lagi pada konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan tarif pajak.

Dalam kasus bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*), transfer sebesar G memberikan kenaikan garis anggaran dari Y ke $Y+G$. Mengikuti Bradford dan Oates (1971a, 1971b), Borcharding dan Deacon (1972), dan Bergstrom dan Goodman (1973), barang publik diasumsikan sebagai barang normal. Dengan asumsi tersebut, transfer yang bersifat umum (*lump-sum*) akan menggeser keseimbangan konsumen dari titik E_0 ke E_M . Pada posisi keseimbangan yang baru tersebut, konsumsi barang publik dan barang privat masing-masing menjadi sebesar Z_1 dan X_1 .

Dengan sifatnya yang tidak bersyarat, tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun yang kemudian menyebabkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan, yaitu sebesar $-TR$, sementara pengeluaran konsumsi barang publik tetap meningkat. Ini berarti transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik. Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa

pengeluaran pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik tidak akan berbeda sebagai akibat dari penurunan pajak daerah atau kenaikan transfer.

Dalam hal bantuan tak bersyarat ini, banyak ekonom yang mengamati pemunculan anomali (Gramlich, 1977; Courant, Gramlich, dan Rubinfeld, 1979). Para peneliti menemukan keseimbangan masyarakat setelah menerima transfer berada pada titik E_{FP} (bukannya pada E_M) yang menunjukkan kenaikan penerimaan pajak daerah (+ TR) dan juga kenaikan konsumsi barang publik (dari Z_1 menjadi Z_2). Ini berarti transfer meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi substitut bagi pajak daerah. Fenomena tersebut di dalam banyak literatur disebut sebagai *flypaper effect*.

Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko, 2001). Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

2.1.3. Identifikasi *Flypaper effect*

Asumsi penentuan terjadinya *flypaper effect* pada penelitian ini fokus pada perbandingan pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Melo (2002) dan Venter (2007) menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi apabila:

1. Pengaruh/ nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap terhadap Belanja Daerah, dan nilai keduanya signifikan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh/ respon PAD terhadap Belanja Daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Sutrisno, 1984). Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18, Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut Pasal 6 Undang-undang No.33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah berasal dari:

1 Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Pada

pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi *budget*) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator) (Suparmoko, 2002). Sedangkan menurut Mardiasmo (1997) mendefenisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut.

Menurut Undang-undang No.34 tahun 2000 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Terdapat banyak batasan tentang pajak yang dikemukakan para ahli, tetapi pada dasarnya isinya hampir sama yaitu pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa imbalan jasa secara langsung (Suparmoko, 2002). Dari batasan atau definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah:

- a. Iuran masyarakat kepada negara
- b. Berdasarkan undang-undang
- c. Tanpa balas jasa secara langsung
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Berdasarkan kewenangan memungutnya pajak digolongkan menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pengertian pajak daerah adalah sama dengan pajak negara, perbedaannya terletak pada :

- a. Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak).
- b. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah (Sutrisno, 1984)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat karena seseorang atau badan hukum menggunakan jasa dan barang pemerintah yang langsung dapat ditunjuk (Sutrisno, 1984). Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2002 tentang retribusi daerah pasal 1 menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pada dasarnya retribusi adalah pajak, tetapi merupakan jenis pajak khusus, karena ciri-ciri dan atau syarat-syarat tertentu masih dapat dipenuhi (Sutrisno, 1984). Syarat-syarat tertentu tersebut antara lain: berdasarkan undang-undang atau peraturan yang sederajat harus disetor ke kas negara atau daerah dan tidak dapat dipaksakan. Batasan pengertian retribusi ini sendiri merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah karena seseorang dan atau badan hukum menggunakan barang dan jasa pemerintah yang langsung dapat ditunjuk. Dari definisi di atas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah.

Lapangan retribusi daerah adalah seluruh lapangan pungutan yang diadakan untuk keperluan keuangan daerah sebagai pengganti jasa yang diberikan oleh daerah.

2. Bagian Laba Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dalam memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada

keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, atau dengan perkataan lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangannya yaitu fungsi ekonomi (Kaho, 1998). Pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah atas dasar berbagai pertimbangan yaitu menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik masyarakat; melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami, seperti angkutan umum atau telepon; dalam rangka mengambil alih perusahaan asing; untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah; dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat, dan/atau menebus biaya, serta untuk menghasilkan penerimaan untuk pemerintah daerah (Devas, 1989).

Sumber pendapatan asli daerah yang ketiga yaitu adalah laba dari perusahaan daerah. Karena berbentuk perusahaan maka prinsip pengelolaannya berdasarkan atas asas-asas ekonomi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus mencari keuntungan dan selanjutnya sebagian dari keuntungan tersebut diserahkan ke kas daerah. Fungsi pokok dari perusahaan daerah adalah :

1. Sebagai dinamisator perekonomian daerah, yang berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian daerah.

2. Sebagai penghasil pendapatan daerah yang berarti harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat diserahkan ke kas daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan mampu memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah. Sifat umum perusahaan daerah berorientasi pada keuntungan yang dapat memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan kata lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangannya yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Artinya pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonomi sebagai badan hukum yang bertujuan mendapatkan laba. Sedangkan, lapangan hasil perusahaan daerah adalah sebagian perusahaan daerah yang bergerak di bidang produksi jasa dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Penerimaan Dinas-dinas dan Pendapatan Lain-lain yang disahkan.

Penerimaan dinas-dinas merupakan penerimaan yang berasal dari usaha dinas-dinas daerah yang bersangkutan yang bukan merupakan penerimaan pajak, retribusi ataupun laba perusahaan daerah. Fungsi pokok dari penerimaan dinas-dinas daerah (kecuali dinas pendapatan daerah) pada umumnya adalah bukan mencari pendapatan daerah, tetapi melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah yang bersifat pembinaan atau bimbingan kepada masyarakat. Penerimaan lain-lain,

dilain pihak adalah penerimaan pemerintah daerah diluar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah. Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah (Hirawan, 1987).

Fungsi utama dari dianas-dinas daerah adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung dan ruginya, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didaya gunakan untuk bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan dengan imbalan jasa. Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik yang berupa materi dalam hal kegiatan bersifat bisnis, maupun non materi dalam hal kegiatan tersebut untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

Jadi di satu pihak dapat menghimpun dana sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di lain pihak lebih mengarah kepada *public service* dan bersifat penyuluhan yaitu tidak mengambil keuntungan, melainkan hanya sekedar untuk menutup resiko biaya administrasi yang dikeluarkan.

2.1.5. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

- a. Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum
- b. Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan
- c. Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan
- d. Kependudukan dan catatan sipil
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- f. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- g. Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi dan usaha kecil dan menengah

- h. Penanaman Modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga
- i. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- j. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
- k. Ketahanan pangan, Pemberdayaan masyarakat dan desa
- l. Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

- a. Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber daya mineral
- b. Pariwisata, Kelautan dan Perikanan
- c. Perdagangan, Industri dan Ketransmigrasian.

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a. Pelayanan Umum, Ketertiban dan Ketrentaman
- b. Ekonomi, Lingkungan Hidup
- c. Perumahan dan Fasilitas Umum
- d. Kesehatan, Pariwisata dan Budaya
- e. Pendidikan, dan Perlindungan Sosial.

Dalam rangka memudahlan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*Principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d. Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- e. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
- f. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah

tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- g. Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- h. Belanja Tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Warsito, dkk 2008).

2.1.6. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Halim (2009) mengatakan bahwa ketimpangan ekonomi anatara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan

diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26 % dari Penerimaan dalam negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

- a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. DAU untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (Bambang Prakosa, 2004).

Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah daerah memiliki sumber

pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

2.2. Penelitian Terdahulu

Selain berpedoman kepada teori-teori yang didapatkan pada literatur-literatur yang dijadikan acuan, penelitian ini juga melihat pada penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan. Sukriy dan Halim (2003) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali”. Yang sebelumnya telah diteliti dan menghasilkan analisis bahwa ketika tidak digunakan tanpa *lag*, pengaruh PAD terhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan *lag*, pengaruh DAU terhadap Belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD dengan tujuan untuk mengetahui transfer (DAU) dan

PAD terhadap belanja pemerintah daerah. Hal ini berarti terjadi *Flypaper effect* dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD.

Haryo Kuncoro (2007) meneliti tentang “fenomena *flypaper effect* pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia”. Studi ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya di Indonesia setidaknya dalam tiga hal. Pertama, studi ini mengklarifikasi keterkaitan langsung antara penerimaan transfer dengan upaya pemerintah daerah dalam menggali PAD. Kedua, dari sisi belanja adalah dengan mengamati sensitivitas belanja pemerintah daerah dalam merespon perolehan transfer. Ketiga, kedua aspek tersebut di atas dirangkum ke dalam satu kerangka kerja dengan memperhatikan eksternalitas fiskal (*budget spillover*), baik sisi penerimaan dan belanja yang muncul secara timbal balik antardaerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa peningkatan alokasi transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan belanja pemerintah daerah diikuti dengan penggalan PAD yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Ada indikasi peningkatan belanja yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi belanja pemerintah daerah terutama belanja operasional.

Darwanto dan Yustikasari (2007) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal” membuktikan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Selain itu pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model

menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.

Kesit Bambang Prakosa (2004) meneliti tentang “Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji DAU dan PAD merupakan faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi belanja pemerintah daerah dan untuk memprediksi belanja pemerintah daerah. Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Dari penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi Belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect*.

Kusumadewi & Rahman (2007) yang meneliti tentang *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah masing-masing variabel independen yaitu PAD dan DAU, signifikan terhadap belanja daerah. Pengaruh DAUt-1 terhadap Belanja Daerah tahun berjalan lebih kuat daripada pengaruh PADt-1 terhadap belanja Daerah *flypaper effect* tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi.

Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel

2.1 berikut :

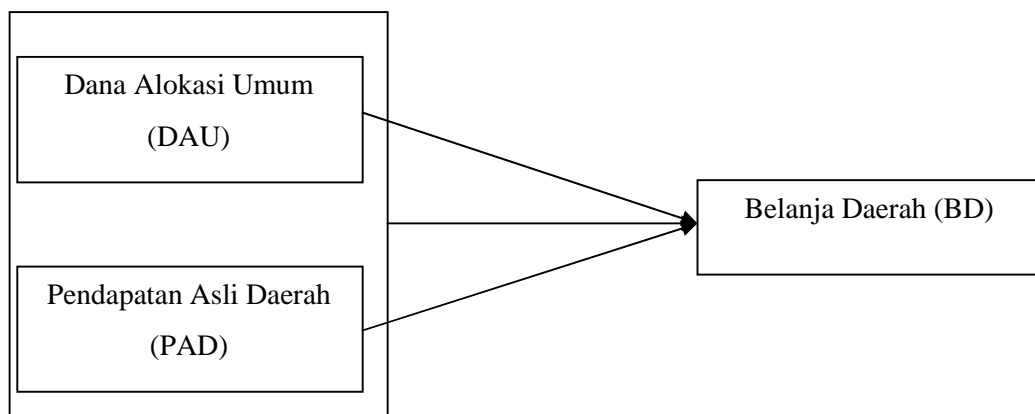
Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Sukriy dan Halim (2002)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintahan daerah: Studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali	Bahwa ketika tidak digunakan tanpa lag, pengaruh PAD terhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan lag, pengaruh DAU terhadap Belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD dengan tujuan untuk mengetahui transfer (DAU) dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah. Hal ini berarti terjadi <i>Flypaper effect</i> dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD.
2.	Haryo Kuncoro (2007)	Fenomena <i>Flypaper effect</i> pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia	Peningkatan alokasi transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan belanja pemerintahan daerah diikuti dengan penggalian PAD yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat.
3	Darwanto dan Yustikasari (2007)	Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal	Pada pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Sedangkan pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.
4	Kesit Bambang Prakosa (2004)	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah: studi empirik di wilayah provinsi jateng dan DIY.	Bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat dan menunjukkan bahwa DAU & PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan terjadinya <i>flypaper effect</i> .
5	Kusumadewi & Rahman (2007)	<i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia	PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah masing-masing variabel independen yaitu PAD dan DAU, signifikan terhadap belanja daerah. Pengaruh DAU-1 terhadap Belanja Daerah tahun berjalan lebih kuat daripada pengaruh PADt-1 terhadap belanja Daerah <i>flypaper effect</i> tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi.

2.3. Kerangka Pemikiran

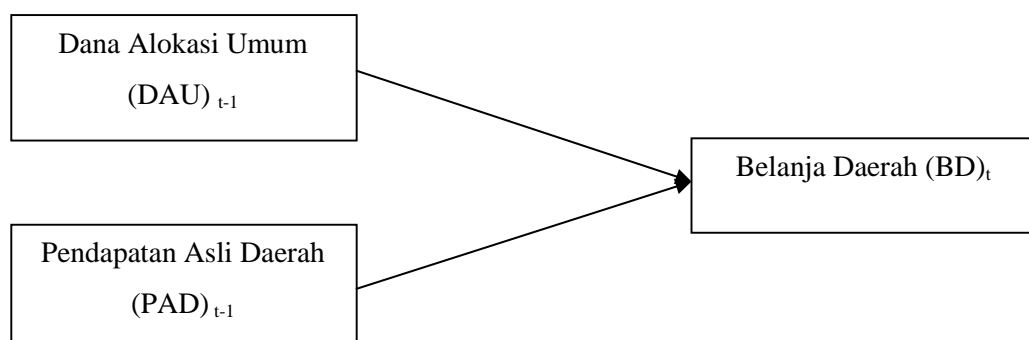
Berdasarkan telaah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis *flypaper effect* pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2011-2012. Model penelitian yang diajukan dalam gambar berikut ini merupakan kerangka konseptual dan sebagai alur pemikiran dalam menguji hipotesis:

Gambar 2.1 a
Kerangka Pemikiran



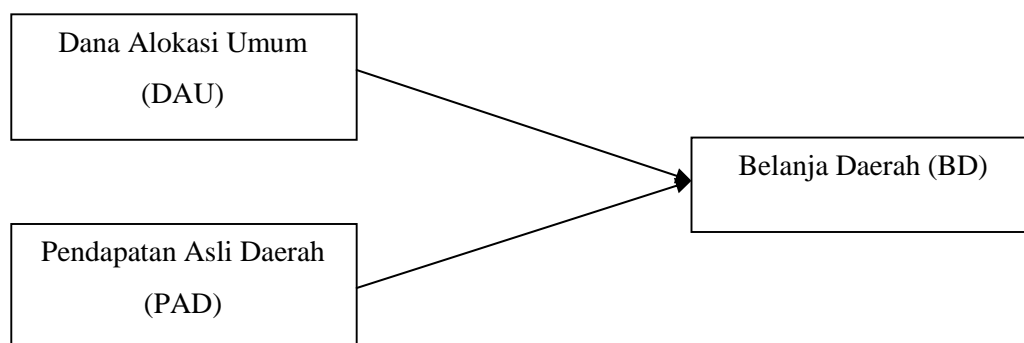
Pada Gambar 2.1a dapat diketahui bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu apabila terjadi *flypaper effect* apabila DAU lebih dominan dalam berpengaruh terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD.

Gambar 2.1 b
Kerangka Pemikiran



Pada Gambar 2.1b dapat diketahui bahwa terjadinya *flypaper effect* apabila DAU_{t-1} lebih dominan dalam berpengaruh terhadap belanja daerah_t dibandingkan dengan PAD_{t-1} .

Gambar 2.1 c
Kerangka Pemikiran
Flypaper Effect pada Daerah Kaya/Miskin



Pada Gambar 2.1c dapat diketahui bahwa daerah kaya atau miskin yang dapat dilihat dari pendapatan dibandingkan dengan pendapatan rata-ratanya, terjadinya *flypaper effect* apabila DAU lebih dominan dalam berpengaruh terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah pernah dilakukan antara lain oleh Aziz *et al.* (2000), Blackley (1986), Joulfaian dan Mokeerjee (1990), Legrenzi dan Milas (2001), Von Furstenberg *et al.* (dalam Sukriy dan Halim, 2003). Dalam beberapa penelitian,

hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja Pemerintah daerah disebut dengan *tax-spend hypothesis*.

Hipotesis ini mengandung makna bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Namun di sisi lain, transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat juga turut mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Legrensi dan Milas (2001) dalam Maimunah (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel *municipalities* di Italia dan memperoleh hasil bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja Daerah. Kebijakan-kebijakan belanja daerah jangka pendek yang dibuat Pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer yang diterima. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: DAU dan PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah

2.4.2 Flypaper Effect

Oates (1999) dalam Sukriy dan Halim (2002) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut *flypaper effect*.

Penelitian tentang analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) di Indonesia sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Abdul Halim dan Sukriy Abdullah yaitu pada Pemerintah kabupaten/kota di pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Hasil penelitian pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali menunjukkan bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, baik dengan *lag* maupun tanpa *lag*. Ketika tanpa menggunakan *lag*, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan *lag*, pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah justru lebih kuat daripada PAD. Hal ini berarti terjadi *flypaper effect* dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD (Sukriy dan Halim 2002). Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa stimulus untuk melakukan Belanja Daerah pada tahun t dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat yang diterima daerah periode $t-1$. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Maimunah (2006) dengan mengambil sampel pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian yang dilakukan Mutiara Maimunah menunjukkan bahwa secara terpisah maupun serempak, DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, baik tanpa *lag* maupun dengan *lag*. Ketika diregres secara serempak baik dengan maupun tanpa *lag*, pengaruh DAU terhadap BD lebih kuat daripada pengaruh PAD. Ini berarti telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Sumatera (Maimunah, 2006). Berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, maka hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya *flypaper effect* adalah:

H₂: Pengaruh DAUt terhadap BDt lebih besar daripada pengaruh PADt terhadap BDt.

H₃: Pengaruh DAUt-1 terhadap BDt lebih besar daripada pengaruh PADt-1 terhadap BDt.

2.4.3 *Flypaper Effect* Pada Daerah Kaya dan Miskin

Pada penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006) diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya tinggi maupun pada daerah yang PAD-nya rendah (yang diukur melalui rasio DOF masing-masing daerah) di Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Ini berarti *flypaper effect* yang terjadi pada daerah kaya PAD tidak berbeda dengan *flypaper effect* yang terjadi pada daerah miskin PAD. Atau dengan kata lain, *flypaper effect* tidak hanya terjadi pada daerah miskin PAD, namun juga daerah kaya PAD. Berdasarkan pada hal tersebut maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H₄: Daerah dengan PAD rendah dan PAD tinggi mengalami *flypaper effect*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian asosiatif'. Penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2002) merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Desain asosiatif ini digunakan untuk menemukan adanya *flypaper effect* yang terjadi dalam transfer dana DAU dan PAD terhadap Belanja daerah yang dilakukan secara empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian *kuantitatif* karena dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam penelitian ini diteliti hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikategorikan sebagai variabel independen, terhadap Belanja Daerah yang dikategorikan sebagai variabel dependen.

3.2.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan

ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

1. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Yang dimaksud dengan Belanja Daerah dalam penelitian ini adalah angka realisasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2011 hingga 2012 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

2. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DAU dan PAD.

a. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penelitian ini adalah angka realisasi DAU Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2011 hingga 2012 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

b. Pendapatan Asli Daerah

PAD dalam penelitian ini merupakan salah satu variabel independen atau variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (BD). Yang dimaksud dengan PAD dalam penelitian ini adalah angka realisasi PAD Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2011 hingga 2012 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

Untuk *flypaper effect* tidak dijabarkan definisi operasionalnya. Hal ini dikarenakan *flypaper effect* merupakan situasi yang dihasilkan oleh ketiga

variabel di atas. Dimana ketika koefisien DAU lebih berpengaruh signifikan terhadap BD daripada PAD maka, situasi ini disebut *flypaper effect*.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, atau ukuran ketertarikan dari hal menjadi perhatian (Mason dan Douglas, 1996). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota pada Tahun 2011 sampai 2012 dengan alasan ketersediaan data.

Sampel adalah suatu porsi atau bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Mason dan Douglas, 1996). Dalam penelitian ini, sampelnya adalah populasi tersebut, jadi populasi ini merupakan sampel penelitian. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder dengan metode sensus yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di internet (www.djpk.depkeu.go.id). Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Langsung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2011 dan 2012.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan APBD Pemerintah daerah dari ke lima kabupaten/kota tersebut, yaitu Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang

diperoleh dari situs departemen keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.go.id).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini dapat dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 1992). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006).

3.6.1 Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk dapat melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2006), yang terdiri dari:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai

signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* <0.10 atau sama dengan nilai VIF >10 (Ghozali, 2006).

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika

ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan menjadi tidak layak untuk dipakai (Singgih Santoso, 2000).

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW test).

Tabel 3.1
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No Decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak di tolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali, 2006

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Deteksi gejala heteroskedastisitas digunakan uji Park, yaitu dengan menguji tingkat signifikansi.

Pengujian ini dilakukan dengan merespon variabel (x) sebagai variabel independen dengan nilai absolut *unstandardized* residual regresi sebagai variabel dependen. Apabila hasil uji di atas level signifikan ($p > 0,05$), berarti tidak terdapat heteroskedastisitas, apabila dibawah level signifikan ($p < 0,05$).

3.6.3 Model Regresi

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat hubungan pendapatan yaitu PAD dan DAU dalam mempengaruhi belanja daerah. Data diolah dengan bantuan software SPSS seri 16.00. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk melihat pengaruh jumlah DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) secara *cross-section* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y: Belanja daerah

a: Konstanta

b: koefisien regresi

X1: DAU

X2: PAD

e: *Error term*

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesa pertama, dilakukan uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan *P Value* f hitung yang dihasilkan dari model regresi tersebut dengan derajat signifikansinya () yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas adalah jika *P Value* f hitung < (= 0,05) maka Ho ditolak. Dimana mempunyai makna bahwa variabel PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengujian hipotesa kedua dilakukan dengan uji t. Uji t dilakukan dengan membandingkan *P Value* t hitung yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen dalam persamaan regresi di atas dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas yaitu jika *P Value* t hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak. Untuk mengetahui adanya *flypaper effect* maka *P Value* t hitung DAU harus lebih signifikan (lebih kecil) daripada *P Value* t hitung PAD, atau *P Value* t hitung PAD tidak signifikan. Begitu pula dengan pengujian hipotesa ketiga, hanya saja variabel independen yang digunakan yaitu PAD dan DAU pada periode 1 tahun sebelumnya (t-1).

Untuk menguji Hipotesis keempat, daerah kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi kategori daerah dengan PAD tinggi dan daerah dengan PAD rendah. Dasar dari pengklasifikasian ini dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas rata-rata dikategorikan sebagai daerah dengan PAD tinggi dan daerah dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibawah rata-rata dikategorikan sebagai daerah dengan PAD rendah. Kemudian, untuk menguji hipotesis keempat, daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah dan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi masing-masing dilakukan analisis regresi berganda dengan model persamaan yang sama. Penentuan apakah *flypaper effect* terjadi atau tidak juga dilakukan dengan menggunakan uji t. Untuk mengetahui adanya *flypaper effect* maka *P Value* t hitung DAU harus lebih signifikan (lebih kecil) daripada *P Value* t hitung PAD, atau *P Value* t hitung PAD tidak signifikan.